

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; pasal 70 ayat (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; Pasal 71 ayat (1) Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Ayat (2) Kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara prinsip LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat yang direpresentasikan oleh DPRD, sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2015 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2010–2015 yang merupakan pedoman operasional pembangunan, untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian, serta evaluasi bagi pelaksanaan pembangunan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai: (i) Kebijakan Umum Anggaran (KUA); (ii) Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; (iii) Penyelenggaraan urusan Desentralisasi; (iv) penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan (v) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2015 secara umum memberikan gambaran pelaksanaan program / kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun pada 2015 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Bintan Akhir Tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010-2015
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2015;

14. Peraturan Bupati Bintan Nomor 86 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Kabupaten Bintan.

1.3 Gambaran Umum

1.3.1 Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi

Kabupaten Bintan secara geografis terletak antara $0^{\circ}06'17''$ - $1^{\circ}34'52''$ Lintang Utara dan $104^{\circ}12'47''$ Bujur Timur di sebelah Barat- $108^{\circ}02'27''$ Bujur Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Natuna, Anambas dan Malaysia.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga.
- Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
- Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat

Gambar I.1 : Peta Administratif Kabupaten Bintan



Sumber : Buku Tata Ruang Kabupaten Bintan Tahun 2011-2031

b. Luas Wilayah

Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Bintan seluruhnya mencapai $87.717,84 \text{ Km}^2$, luas daratannya hanya 1,50% atau sebesar

1.319,51 Km² saja dan luas lautnya 86.398,33 Km² (98,50%). Kecamatan terluas daratannya adalah Kecamatan Gunung Kijang dengan luas 503,12 Km² dan Kecamatan terkecil adalah Tambelan yaitu 169,42 Km². Kabupaten Bintan saat ini terdiri dari 240 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang sudah dihuni, sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni sebagian sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, khususnya usaha perkebunan. Dilihat dari topografinya, pulau-pulau di Kabupaten Bintan sangat bervariasi. Umumnya dibentuk oleh perbukitan rendah membundar yang dikelilingi oleh daerah rawa-rawa.

c. Topografi

Wilayah Kabupaten Bintan merupakan bagian dari paparan kontinental yang terkenal dengan nama Paparan kontinental yang disebut Paparan Sunda. Morfologi pulau Bintan tidak memiliki perbedaan ketinggian yang menyolok yaitu antara 0-350 meter dari muka laut. Penonjolan puncak-puncak bukit antara lain Gunung Bintan 348 meter, Gunung Bintan Kecil 196 meter. Bukit-bukit lainnya merupakan bukit-bukit dengan ketinggian dibawah 100 meter. Bukit-bukit tersebut merupakan daerah hulu-hulu sungai yang sebagian besar mengalir kearah Utara dan Selatan dengan pola sub-paralel, sedangkan pola anak-anak sungainya berpola sub-radial. Sungai-sungai itu umumnya pendek-pendek, dangkal dan tidak lebar. Pada umumnya wilayah Kabupaten Bintan beriklim tropis. Pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Bintan temperatur rata-rata terendah sebesar 19⁰ celcius dan tertinggi rata-rata sebesar 33,6⁰ celcius dengan kelembaban nisbi rata-rata tercatat sekitar 83%. Kecepatan arah angin rata-rata 18km/jam dengan arah angin bervariasi.

1.3.2 Gambaran Demografis

a. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Bintan berdasarkan estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan tahun 2015 berjumlah sebesar 153.020 jiwa terdiri dari 39.079 rumah tangga (KK). Jumlah penduduk laki-laki sebesar 78.824 jiwa (51,51%) dan penduduk perempuan sebesar 74.196 jiwa (48,49%). Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio) sebesar 106,24. Artinya setiap 100 perempuan berbanding dengan 106 penduduk laki-laki, jumlah penduduk laki-laki 3,02% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Persentase ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kecamatan yang terpadat penduduknya masih tercatat kecamatan Bintan Timur dengan jumlah penduduk tertinggi 41.607 jiwa (27,19%), sedangkan yang terendah adalah dikecamatan Mantang sebanyak 4,168 jiwa (2,75%).

Tabel I.1 : Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Bintan Tahun 2015

Kecamatan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Teluk Bintan	4.871	4.327	9.198
Bintan Utara	11.363	11.381	22.744
Teluk Sebong	9.506	8.435	17.941
Seri Kuala Lobam	8.601	10.398	18.999
Bintan Timur	21.564	20.043	41.607
Gunung Kijang	7.285	6.084	13.369
Mantang	2.297	1.929	4.226
Bintan Pesisir	4.590	3.821	8.411
Toapaya	6.127	5.295	11.422
Tambelan	2.620	2.483	5.103
KABUPATEN BINTAN	78.824	74.196	153.020

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

Tabel I.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Dependency Rasio di Kabupaten Bintan, Tahun 2014-2015

No	Kelompok Umur	Tahun	
		2014	2015*
1.	0-4	16.350	16.518
2.	5-9	16.566	16.769
3.	10-14	14.085	14.291
4.	15-19	10.159	10.301
5.	20-24	10.595	10.684
6.	25-29	15.235	15.373
7.	30-34	16.022	16.178
8.	35-39	13.914	14.068
9.	40-44	11.141	11.282
10.	45-49	8.437	8.570
11.	50-54	5.944	6.050
12.	55-59	4.419	4.503
13.	60-64	3.270	3.336
14.	65-69	2.288	2.339
15.	70-74	1.442	1.473
16.	75+	1.256	1.285
Jumlah		151.123	153.020
Dependency Rasio		52,44	52,49

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2016

* : Data Sangat Sementara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Bintan dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif. LPP rata-rata tahun 2010 - 2014 adalah sebesar 1.63 per tahun, sedangkan pada tahun 2015 LPP Kabupaten Bintan diestimasi 1,26% menurun dibanding tahun 2014 yaitu 1,34% yang diperkirakan berbanding lurus dengan meningkatnya capaian kegiatan program Keluarga Berencana di Kabupaten Bintan. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor yang dinamis dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintan yang berada diatas 6% pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 disinyalir menimbulkan daya tarik investasi yang pada akhirnya berkontribusi cukup besar pada bertambahnya migrasi penduduk dari daerah lain ke Kabupaten Bintan untuk mencari pekerjaan.

Angka beban ketergantungan (Dependency Ratio) atau perbandingan antara penduduk yang belum produktif ataupun yang sudah tidak produktif lagi (usia 0-14 tahun ditambah penduduk usia 65 tahun ke atas) dibagi dengan penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun). Dependency Ratio Kabupaten Bintan pada tahun 2014 mencapai 52.44 dan terus menunjukkan

peningkatan pada tahun 2015 yang diestimasi 52,49. Artinya bahwa pada tahun 2015, untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Bintan menanggung sekitar 52 penduduk usia belum/tidak produktif.

b. Angka Kerja dan Ketenagakerjaan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan berdasarkan persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bintan, Mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan pada tahun 2015 diestimasi masih di dominasi sektor pertanian yang didalamnya termasuk sub sektor perikanan, walaupun sektor pertanian masih menempati urutan pertama dalam mata pencaharian penduduk, akan tetapi dibandingkan tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,52%; sedangkan pada beberapa sektor lainnya terjadi pergeseran struktur mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan. Pada urutan kedua yaitu sektor perdagangan, rumah makan dan hotel terus mengalami perkembangan yang positif dimana pada tahun 2014 hanya menempati urutan ketiga dengan persentase 19.01% sedangkan pada tahun 2015 menjadi 23,36%; Hal ini disebabkan karena berkembangnya sektor kepariwisataan di Kabupaten Bintan sehingga terjadi pergeseran mata pencaharian penduduk Kabupaten Bintan khususnya sektor pariwisata. Pada tahun 2015 sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 1,79% dari 19,28% menjadi 21,07% pada tahun 2015. Sektor industri pengolahan mengalami peningkatan dari tahun 2014 yaitu 12,28% menjadi 17,96% pada tahun 2015 sehingga menempati urutan ke empat.

Tabel I.3 : Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Kabupaten Bintan

No	Mata Pencaharian Penduduk	2014	2015*
1.	Pertanian	25,32	24,80
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,02	1,48
3.	Industri pengolahan	12,28	17,96
4.	Listrik, Gas dan Air	1,47	0,26
5.	Bangunan	8,09	6,00
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel	19,01	23,36
7.	Angkutan, Pegudangan dan Komunikasi	6,59	4,53
8.	Keuangan, Asuransi dan Usaha Persewaan	5,15	2,33
9.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	21,07	19,28
10.	Lainnya	-	-
	Jumlah	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2016

* : Data Sangat Sementara

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan Penduduk Usia Kerja pada tahun 2014 yaitu 104.312 orang meningkat pada tahun 2015 yaitu 105.699 orang. Sementara itu Angkatan Kerja menunjukkan penurunan dari tahun 2014 yaitu 67.749 orang menjadi 66.145 orang pada tahun 2015. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK di Kabupaten Bintan mengalami penurunan dari 64,95% pada tahun 2014 menjadi 62,83%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bintan disetimasi mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu 8,12% menjadi 6,88%.

Tabel I.4 : Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015

No	Uraian	2014	2015*
1.	Penduduk Usia Kerja (orang)	104.312	105.699
2.	Angkatan Kerja	67.749	66.415
3.	Bekerja	62.247	61.843
4.	Mencari Pekerjaan	5.502	4.572
5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64,95	62,83
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,12	6,88

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2016

* : Data Sangat Sementara

1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur kualitas sumberdaya manusia digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) serta merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salahsatu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2014 BPS Indonesia mengubah metodologi perhitungan IPM, hal ini dikarenakan beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Selain itu PDB perkapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; secara teknis penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah pada suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi yang lain. Dengan perhitungan IPM metode baru maka indikator yang digunakan lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Dengan adanya data rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi, PNB menggantikan PDB juga lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Bintan diestimasi 72,01 poin meningkat dari tahun 2014 yaitu 71,65 poin. Angka 72,01 berdasarkan klasifikasi BPS Indonesia berarti Kabupaten Bintan memiliki nilai IPM tinggi diatas 70,00.

Tabel I.5 : Perkembangan IPM Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015

No	Tahun	IPM
1	2014	71,65
2	2015*	72,01

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

*: Data Sangat Sementara

Walaupun IPM di Kabupaten Bintan sudah tergolong tinggi, namun Kabupaten Bintan masih berpotensi untuk meningkatkan angka IPM melalui berbagai usaha secara simultan, baik melalui pendekatan sektoral pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maupun secara terintegrasi melalui anggaran pemerintah, swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha, atau kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan capaian IPM menjadi sangat tinggi.

a. Pendidikan

Tolok ukur bidang pendidikan adalah indikator mutu pendidikan yang dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi. Angka partisipasi tersebut terdiri atas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Angka partisipasi kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu atau dengan kata lain APK tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Nilai APK yang tinggi menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Sedangkan angka partisipasi murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut, dengan kata lain APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai jenjang pendidikannya.

Dari hasil evaluasi kinerja Wajib Belajar Dikdas 9 tahun serta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan diketahui bahwa tahun 2014 Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan SD yaitu 98,70% meningkat menjadi 98,98% pada tahun 2015. Artinya pada tahun 2014 ada sebanyak 98,98% penduduk yang berusia 7-12 tahun telah tertampung di SD. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk pendidikan SD pada tahun 2014 yaitu 107,16 meningkat menjadi 107,52%. Hal ini membuktikan bahwa jumlah murid SD yang dapat ditampung pada sekolah-sekolah SD yang ada sudah melebihi jumlah penduduk usia sekolah, namun demikian

masih banyak murid SD yang berumur kurang atau melebihi usia 7-12 tahun yang mengikuti pendidikan SD.

Untuk APK jenjang SMP/MTs tahun 2014 adalah 95,31% sedangkan pada tahun 2015 yaitu 95,70%. Untuk APM SMP/MTs pada tahun 2014 yaitu 87,17% sedangkan 2015 yaitu 87,97%. Untuk APK jenjang SMA tahun 2014 yaitu 86,65% sedangkan pada tahun 2015 mencapai 86,97% sedangkan APM jenjang SMA pada tahun 2014 menunjukkan angka 76,10% sedangkan pada tahun 2015 mencapai 76,53%.

Jika dilihat berdasarkan komponennya peningkatan capaian angka IPM Kabupaten Bintan dewasa ini merupakan kontribusi terbesar dari Indeks Pendidikan yang semakin baik. Menurut data BPS tahun 2014 capaian Indeks Pendidikan sebesar 60,4 poin dengan harapan lama sekolah 11,80 tahun diestimasi meningkat menjadi 61,2 poin dengan harapan lama sekolah 11,97 di tahun 2015. Rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia diatas 25 tahun di Kabupaten Bintan pada tahun 2014 yaitu 8,30 tahun dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 8,36 hal ini menunjukkan penurunan angka drop out yang cukup signifikan dari tahun ke tahun sehingga mampu menunjang pencapaian rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan.

Tabel I.6 : Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015

No	Tahun	Harapan lama sekolah (tahun)	Indeks Pendidikan
1.	2014	11,80	60,4
2.	2015*	11,97	61,2
Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2016			
*: Data Sangat Sementara			

Tabel I.7 : Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 tahun keatas dan indeksnya di Kabup[aten Bintan

No	Tahun	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	Indeks Rata-Rata lama sekolah
1.	2014	8,30	0,553
2.	2015*	8,36	0,557

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2016
*: Data Sangat Sementara

Berbagai pencapaian di bidang pendidikan tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan diantaranya dengan meneruskan implementasi kebijakan penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), pengalokasian Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM), pemerataan pendidikan melalui bantuan kepada siswa SMA/SMK kurang mampu, serta melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Selain itu pemerintah daerah Kabupaten Bintan juga memberikan perhatian penting terhadap guru melalui peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru.

b. Kesehatan

Pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bintan pada tahun 2014 adalah 69,91 tahun dan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan AHH diestimasi meningkat menjadi 69,99 tahun pada tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Bintan terus berupaya secara komprehensif serta telah melakukan koordinasi lintas sektoral secara intensif dalam rangka mewujudkan perbaikan bidang kesehatan dengan capaian utama Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan (IK). Angka Harapan Hidup (AHH) dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Pemerintah Kabupaten Bintan masih berusaha keras untuk menekan Angka Kematian Bayi maupun Angka Kematian Ibu saat melahirkan setiap tahunnya dalam rangka membantu mendorong Angka Harapan Hidup. Angka Harapan Hidup diyakini memiliki hubungan berbanding terbalik terhadap kemiskinan. Peningkatan Angka Harapan Hidup dipercaya mampu menekan bahkan mengurangi angka kemiskinan. Intervensi pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk memperbaiki kondisi kesehatan diharapkan mampu berdampak pada meningkatnya produktivitas golongan miskin, kesehatan yang lebih baik dan meningkatkan daya kerja, mengurangi hari tidak bekerja dan menaikkan output energi. Terkait dengan usaha peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Bintan sangat proaktif dalam mendukung implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional. Perkembangan positif ini sangat mempengaruhi angka Indeks Kesehatan (IK) Kabupaten Bintan. Indeks

Kesehatan Kabupaten Bintan pada tahun 2014 adalah 76,8 poin diestimasi meningkat menjadi 76,9 poin.

Tabel I.8 : Perkembangan Angka Harapan Hidup dan Indeks Kesehatan di Kabupaten Bintan Tahun 2014-2015

No	Tahun	Angka Harapan Hidup	Indeks Kesehatan
1.	2014	69,91	76,8
2.	2015*	69,99	76,9

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2016

*: Data Sangat Sementara

c. Daya Beli

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan pencapaian daya beli (Purchasing Power Parity) masyarakat Kabupaten Bintan yang diukur dengan pendapatan riil perkapita/tahun menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 pendapatan riil perkapita mencapai sebesar Rp13.477.450,- meningkat menjadi sebesar Rp13.596.240,- pada tahun 2015. Demikian pula dengan Indeks Daya Beli penduduk Kabupaten Bintan yang terus mengalami peningkatan, dari 79,3 poin pada tahun 2014 meningkat menjadi 79,5 pada tahun 2015. Peningkatan Indeks Daya Beli tidak terlepas dari pengaruh kinerja makro dan mikro ekonomi. Hal ini tercermin dari besaran pencapaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang cukup terkendali.

Tabel I.9 : Pendapatan Riil Perkapita dan Indeks Daya Beli Masyarakat Kabupaten Bintan, Tahun 2014-2015

No	Tahun	Pendapatan Riil Perkapita (Ribu Rp)	Indeks Daya Beli
1	2014	13.477,45	79,3
2	2015*	13.596,24	79,5

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, 2016

*: Data Sangat Sementara

Pada umumnya indikator-indikator IPM berkembang secara steady, kecuali indeks daya beli. Indeks Daya Beli berkaitan langsung dengan pendapatan penduduk, yang dipengaruhi oleh kinerja perekonomian. Perekonomian yang kondusif akan memungkinkan terciptanya iklim ekonomi yang prospektif. Iklim perekonomian yang kondusif diharapkan akan membuka kesempatan kerja sehingga

mampu meningkatkan pendapatannya yang pada gilirannya akan meningkatkan daya beli masyarakat. Tingkat kondusifitas perekonomian sangat sensitif terhadap perkembangan perkembangan harga (inflasi). Inflasi tinggi akan dapat memberi dampak secara langsung menurunkan daya beli masyarakat. Pengendalian laju inflasi dipercaya akan sangat berdampak dalam menjaga dan menumbuhkan daya beli masyarakat. Mengantisipasi kebijakan makro ekonomi nasional yang mungkin mengalami perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Bintan telah melaksanakan program Peningkatan Ketahanan Masyarakat, serta program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan program lainnya sehingga kebutuhan dasar masyarakat terutama masyarakat miskin dan tertinggal dapat terpenuhi dalam rangka mendukung peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bintan.

1.3.4 Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Bintan sangat komitmen untuk mempercepat pembangunan manusia dan memberantas kemiskinan seperti yang telah dicanangkan melalui deklarasi milenium atau yang lebih dikenal dengan Millenium Development Goals (MDGs).

Dari 8 tujuan MDGs yang disepakati kewajiban pemerintah daerah hanya memiliki 7 tujuan MDGs yakni menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya dan memastikan kelestarian lingkungan hidup. Sedangkan pencapaian tujuan membangun kemitraan global untuk pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pencapaian target MDGs tersebut telah diimplementasikan dengan cara mengintegrasikannya ke dalam program dan kegiatan yang telah direncanakan dan tetapkan bersama sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dari berbagai upaya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan telah menunjukkan manfaat (outcome)

yang menggembirakan, adanya penurunan jumlah penduduk miskin dari 9.273 jiwa atau sebesar 6,09% tahun 2014 diestimasi menjadi 6,00% atau sebesar 9.198 jiwa pada tahun 2015.

Tabel I.11 : Proporsi Penduduk Miskin Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Bintan, Tahun 2004-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2014	151.123	1,34	9.273	6,09
2015	153.020	1,26	9.198	6,00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

*: Data Sangat Sementara

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bintan bersama Provinsi Kepulauan Riau maupaun Pemerintah Pusat terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui program-program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; (4) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

1.3.5 Perkembangan Ekonomi

Salah satu indikator kinerja pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi pemerintahan daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut, serta usaha dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Beberapa indikator pencapaian pembangunan ekonomi adalah: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan tingkat inflasi. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bintan yaitu Industri, Pariwisata dan Pertanian, dengan uraian sebagai berikut :

1.3.6 Potensi Unggulan Daerah

Salah satu stimulan peningkatan potensi unggulan daerah Kabupaten Bintan adalah dengan ditetapkannya Kabupaten Bintan sebagai salah satu Kawasan Free Trade Zone. Pembentukan Free Trade Zone di Kabupaten Bintan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Adapun daerah yang termasuk dalam Free Trade Zone Bintan adalah kawasan Bintan Utara dengan liputan wilayah hampir setengah Pulau Bintan. Terdapat 5 lokasi lain yang berupa enclave yaitu kawasan Anak Lobam, kawasan Maritim Bintan Timur, kawasan galang Batang, kawasan Galang Batang, kawasan Senggarang dan kawasan Industri Dompok Barat. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Kota Tanjungpinang menjadi suatu wilayah administratif yang berdiri sendiri. Dalam hal ini kawasan Senggarang dan kawasan industri Dompok Barat termasuk ke dalam Free Trade Zone Bintan wilayah kota Tanjungpinang. Kawasan Industri Lobam termasuk dalam lingkup Kawasan Bintan Bagian Utara.

Free Trade Zone Bintan dengan luas 62.017,20 Ha tersebut saat ini 23.000 Ha merupakan kawasan wisata internasional Lagoi yang dikelola sendiri oleh Penanam Modal Asing dengan core wisata pantai dan golf. Sedangkan seluas 4.000 Ha merupakan kawasan industri Lobam.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang kawasan Batam, Bintan dan Karimun maka kawasan Free Trade Zone Batam Bintan Karimun mencakup 26 Kecamatan yang 7 kecamatan diantaranya termasuk sebagian wilayah Kabupaten Bintan. Adapun Struktur Ruang Kawasan Free Trade Zone Bintan terdiri dari sistem pusat kegiatan (PK) Primer yaitu:

1. Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor, yaitu kawasan industri Galang Batang Kecamatan Gunung Kijang, Kawasan Industri Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Maritim Bintan Timur di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi utama Pusat Kegiatan Berorientasi Ekspor ini adalah pengembangan industri skala besar. Sedangkan fungsi pendukungnya sebagai simpul transportasi, pemukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal.
2. Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik, yaitu Kawasan Wisata Internasional Lagoi di Kecamatan Teluk Sebong, Kawasan Wisata Penghujan-

Kuala Sempang di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kawasan Wisata Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Kawasan Wisata Sakera di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Pariwisata Mancanegara dan Domestik ini adalah pengembangan kepariwisataan. Sedangkan fungsi pendukungnya sebagai pemukiman dan simpul transportasi penumpang.

3. Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa, yaitu Pusat Kegiatan Perdagangan dan Jasa Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Perdagangan dan jasa ini adalah perdagangan dan jasa internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pemukiman, simpul transportasi penumpang dan wisata belanja.
4. Pusat Kegiatan Transportasi Laut, yakni pelabuhan Bandar Seri Udana dan Pelabuhan Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara, Pelabuhan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Pelabuhan Kijang di Kecamatan Bintan Timur. Fungsi Utama Pusat Kegiatan Transportasi Laut ini adalah pertransportasian. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah pelayanan perpindahan penumpang dan barang.
5. Pusat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara, yakni Mentigi di Kecamatan Bintan Utara, Gunung Bintan Kecil di Kecamatan Teluk Sebong, dan Tanjung Berakit dan Tanjung Sading di Kecamatan Teluk Sebong. Fungsi utama Pusat Kegiatan Kegiatan Pertahanan dan Keamanan Negara ini adalah pertahanan dan keamanan negara. Sedangkan fungsi pendukungnya adalah menjaga kedaulatan KNRI yang meliputi pertahanan dan keamanan laut serta udara.
6. Pusat Kegiatan Kesehatan, Kawasan Bandar Seri Bentan di Kecamatan Teluk Bintan, dan Kawasan Perkotaan Tanjung Uban dan Kawasan Seri Kuala Lobam di Kecamatan Bintan Utara. Fungsi utama Pusat Kegiatan Kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan berkualitas internasional. Sedangkan fungsi pendukungnya penyediaan pelayanan perkotaan.

Kabupaten Bintan masih mengandalkan sektor industri pengolahan masih sebagai penyumbang PDRB terbesar pada 5 tahun terakhir dengan kontribusi mencapai 30% lebih. Spill over effect pembangunan Singapura dan Malaysia yang

merupakan kutub utama pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara telah berimbas pada perkembangan Industri di Kabupaten Bintan sebagai pendukung sektor industri Singapura. Sedangkan sub sektor Pariwisata dan jasa sebagai penyumbang PDRB merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kabupaten Bintan dalam 5 tahun terakhir. Investasi di Kabupaten Bintan juga menunjukkan peningkatan, pada tahun 2015 nilai investasi PMA US\$1,251.371- juta dengan total 199 perusahaan sedangkan nilai investasi PMDN Rp1,45 triliun dengan total 34 perusahaan meningkat dibandingkan tahun 2014 dengan nilai investasi PMA US\$916.74 juta dengan total 174 perusahaan sedangkan nilai investasi PMDN Rp1,457 trilyun,- dengan total 34 perusahaan, nilai investasi PMDN pada tahun 2014 dan 2015 tidak mengalami perubahan karena penambahan 17 perusahaan tersebut baru mendaftar dan diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2016. Potensi unggulan daerah yang menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan juga terdapat pada sektor pertanian pada sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan antara lain padi, sayuran, buah naga, salak dan lain sebagainya. Jenis-jenis tanaman perkebunan seperti karet, kelapa, dan cengkeh dapat dijumpai disemua kecamatan dengan luas yang bervariasi. Disisi lain terdapatnya potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk kegiatan perikanan tangkap maupun budidaya juga merupakan andalan untuk dapat dikembangkan di Kabupaten Bintan.

1.3.7 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan, PDRB Kabupaten Bintan pada tahun 2015 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 diestimasi sebesar Rp12,40 trilyun,- meningkat dari tahun 2014 yaitu Rp11,65 trilyun,- yang diukur dari tujuh belas sektor lapangan usaha yaitu:

Tabel I.14: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha		2014	2015*
Sektor Primer		2,661,828.80	2,788,208.46
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	712,504.96	766,191.01
2	Pertambangan dan Penggalian	1,949,323.84	2,022,017.46
Sektor Sekunder		6,081,361.34	6,483,546.31
3	Industri Pengolahan	4,362,139.71	4,597,373.08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,155.91	15,586.05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,029.38	7,306.09
6	Konstruksi	1,697,036.34	1,863,281.09
Sektor Tersier		2,907,221.52	3,133,259.63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,028,784.86	1,129,985.97
8	Transportasi dan Pergudangan	241,850.83	262,818.42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	563,777.25	613,644.81
10	Informasi dan Komunikasi	164,481.27	171,139.20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	179,674.48	184,485.47
12	Real Estate	127,019.76	133,127.99
13	Jasa Perusahaan	112.28	113.10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	257,405.99	274,469.16
15	Jasa Pendidikan	212,798.10	225,275.81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,636.63	113,266.07
17	Jasa lainnya	23,680.06	24,933.63
PDRB BERLAKU		11,650,411.66	12,405,014.41

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

*: Data Sangat Sementara

Sektor-sektor yang memiliki nilai kontribusi besar terhadap PDRB adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 37,18%, sektor konstruksi 15,68%, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 15,18%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,01% serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 6,29%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.15 : Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bintan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha		2014	2015*
Sektor Primer		21.49	20.89
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.73	5.71
2	Pertambangan dan Penggalian	15.76	15.18
Sektor Sekunder		52.60	53.01
3	Industri Pengolahan	37.15	37.18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.05
6	Konstruksi	15.30	15.68
Sektor Tersier		25.91	26.10
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.80	9.01
8	Transportasi dan Pergudangan	2.09	2.16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.24	6.29
10	Informasi dan Komunikasi	1.17	1.10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.42	1.36
12	Real Estate	1.04	1.03
13	Jasa Perusahaan	0.00	0.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.30	2.31
15	Jasa Pendidikan	1.78	1.78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.87	0.86
17	Jasa lainnya	0.20	0.20
PDRB BERLAKU		100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

*: Data Sangat Sementara

Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil digunakan PDRB Harga Konstan. PDRB Harga Konstan ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi karena menggunakan harga dasar yang konstan yakni harga dasar tahun tertentu yang dipilih yaitu tahun 2010. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang diukur dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berdasarkan harga konstan pada tahun 2015 mengalami perlambatan dari tahun 2014. Pada tahun 2014 LPE Kabupaten Bintan adalah 8,46% mengalami perlambatan pada tahun 2015 menjadi 6,48%. Penurunan LPE di Kabupten Bintan pada tahun 2015 disinyalir imbas dari kondisi makro perekonomian di tingkat regional, nasional serta dunia masih labil dan fluktuatif, pelarangan ekspor bahan mentah pertambangan menurunkan aktifitas pertambangan yang turut berimbas pada pertumbuhan sektor

Pertambangan dan Penggalian. Fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan pemerintah berdasarkan harga pasar memberikan dampak pada ketidakpastian harga pasar, kenaikan Tarif Dasar Listrik, isu stabilitas ekonomi nasional melalui paket-paket kebijakan yang diambil ditingkat pusat yaitu menurunnya dana bagi hasil yang ditransfer pemerintah pusat yang menyebabkan turunnya belanja publik. Selain itu bencana nasional kabut asap turut memberikan dampak pada jumlah wisatawan serta lama tinggal wisatawan yang pada gilirannya akumulasi dari keseluruhan isu tersebut turut mempengaruhi Laju Pertumbuhan Ekonomi sepanjang Tahun 2015.

Tabel 1.16 : Laju Pertumbuhan Persektor Kabupaten Bintan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2015

Lapangan Usaha		2014	2015*
Sektor Primer		8.08	4.75
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.74	7.53
2	Pertambangan dan Penggalian	7.13	3.73
Sektor Sekunder		8.33	6.61
3	Industri Pengolahan	7.80	5.39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5.06	2.84
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.97	3.94
6	Konstruksi	9.74	9.80
Sektor Tersier		9.08	7.78
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.62	9.84
8	Transportasi dan Pergudangan	9.04	8.67
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.92	8.85
10	Informasi dan Komunikasi	5.87	4.05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.14	2.68
12	Real Estate	6.39	4.81
13	Jasa Perusahaan	-0.28	0.73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.92	6.63
15	Jasa Pendidikan	6.26	5.86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.85	5.23
17	Jasa lainnya	12.71	5.29
PDRB BERLAKU		8.46	6.48

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

*: Data Sangat Sementara

1.3.8 Tingkat Kestabilan Harga (Inflasi)

Tingkat kestabilan harga (inflasi) juga merupakan salah satu ukuran kinerja perekonomian Pemerintah Daerah dalam mengendalikan gejolak harga terutama untuk komoditi yang strategis yang diukur dengan mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tabel I.17: Laju Inflasi (IHK) Kabupaten Bintan (berdasarkan IHK Kota Tanjungpinang) Tahun Dasar 2007, Tahun 2014-2015

No	Kebutuhan Pokok	2014	2015*
1.	Bahan Makanan	6,18	5,65
2.	Makanan Jadi	5,97	6,76
3.	Perumahan	7,77	1,24
4.	Sandang	6,92	5,73
5.	Kesehatan	3,51	3,52
6.	Pendidikan	7,14	1,48
7.	Transport	12,40	-6,21
	IHK	7,49	2,46

Sumber : BPS Kabupaten Bintan, Tahun 2016

*: Data Sangat Sementara

IHK Kabupaten Bintan mengacu pada IHK Kota Tanjungpinang dimana secara umum pada tahun 2014 IHK Kota Tanjungpinang mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu dari 7,49% menurun menjadi 2,46%. Dari tujuh komponen pembentuk inflasi lima diantaranya mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu komponen bahan makanan, perumahan, sandang, pendidikan dan transportasi. Komponen transportasi mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu -18,61%, hal ini diakibatkan oleh penyesuaian harga tariff transportasi karena penurunan harga Bahan Bakar Minyak selain itu komponen perumahan mengalami penurunan -6,53% serta pendidikan -5,66%. Sedangkan komponen yang mengalami kenaikan pada tahun 2015 adalah makanan jadi meningkat 0,79% serta kesehatan mengalami kenaikan 0,01%. Hal ini merupakan salah satu bukti nyata kinerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam usaha pengendalian harga pasar dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

1.4 Sistematika

Sistematika Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Bintang Akhir Tahun Anggaran 2015 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Sistematika tersebut memuat laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kepada urusan wajib dan urusan pilihan yang terdiri dari 7 (tujuh) bab yang secara rinci tersusun sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi tentang dasar hukum, gambaran umum daerah, gambaran umum demografis dan kondisi ekonomi meliputi potensi unggulandaerah dan pertumbuhan ekonomi/PDRB, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB. II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi tentang visi dan misi, strategi dan arah kebijakan daerah (sesuai RPJMD tahun 2010-2015) dan prioritas daerah sesuai dengan RKPD.

BAB.III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Berisi tentang pengelolaan pendapatan dan belanja daerah meliputi kebijakan umum, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, target dan realisasi pendapatan serta permasalahan dan solusi.

BAB. IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi program dan kegiatan, realisasi, permasalahan dan solusi.

BAB. V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Menguraikan tentang tugas pembantuan yang diterima terdiri dari dasar hukum, instansi pemberi tugas pembantuan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan, program dan kegiatan yang diterima

dan pelaksanaannya, sumber dan jumlah anggaran serta permasalahan dan solusi.

BAB. VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Menguraikan tentang kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah meliputi kebijakan dan kegiatan, realisasi, permasalahan dan solusi. Selain itu pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB.VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok, sebagai ringkasan eksekutif atas rangkaian kegiatan dan hasil yang telah ditempuh Pemerintah Kabupaten Bintan.